

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Triwulan II Perkembangan Harga berdasarkan IPH mengalami trend fluktuasi, hal ini terlihat pada nilai IPH Kabupaten Barito Utara selama 3 (tiga) bulan terakhir Triwulan II yaitu pada rentang 1,87 s.d 0,23 dengan puncak penurunan terdalam yaitu pada Bulan Mei minggu pertama -0,39 s.d Bulan Mei minggu kelima di angka -0,81, dengan komoditi yang mempengaruhi yaitu Bawang Merah, Bawang Putih, dan Gula Pasir.

Pada bulan Mei, beberapa komoditas mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Bawang merah turun menjadi Rp35.000 per kilogram dari harga sebelumnya di bulan April sebesar Rp48.000, Bawang putih juga mengalami penurunan menjadi Rp40.000 dari Rp42.000, sementara gula pasir turun menjadi Rp18.000 dari Rp19.000 pada bulan sebelumnya. Penurunan harga ini terjadi akibat penyesuaian pasar pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), di mana permintaan masyarakat cenderung menurun setelah periode belanja tinggi. Kondisi ini menyebabkan harga-harga komoditas kembali ke level normal tetapi memasuki bulan Juni, terjadi pemulihan dan stabilisasi harga

Risiko ke depan terhadap perkembangan harga di Kabupaten Barito Utara adalah masuknya musim kemarau yang berpotensi mengganggu produksi komoditas hortikultura, seperti bawang dan cabai yang sebagian besar dipasok dari luar daerah, sehingga dapat menyebabkan tekanan kenaikan harga di tingkat konsumen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), yaitu Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah yang jatuh pada tanggal 31 Maret 2025, terjadi penurunan harga pada beberapa komoditas strategis seperti bawang merah, bawang putih, dan gula pasir. Selama bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, terjadi lonjakan permintaan masyarakat yang mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas. Namun setelah Idul Fitri berakhir, tingkat konsumsi masyarakat menurun secara signifikan, sementara pasokan barang masih dalam kondisi tinggi. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan kelebihan stok di pasaran, yang kemudian memicu penurunan harga sebagai bentuk penyesuaian pasar. Fenomena ini merupakan bagian dari siklus musiman, di mana harga komoditas cenderung meningkat menjelang HBKN dan mengalami penurunan setelahnya seiring proses stabilisasi harga.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan yang di tempuh Kabupaten Barito Utara terhadap penanganan kestabilan harga seluruh komoditas pada Triwulan II yaitu dengan melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah pada Hari Kamis H-1 Idul Adha 1446H, kemudian di laksanakan penanaman jagung Hibrida Muara Teweh Kabupaten Barito Utara dan terakhir melaksanakan Operasi Pasar Murah dalam rangka stabilisasi harga barang kebutuhan pokok Kabupaten Barito Utara serta Pemanfaatan Data IPH sebagai dasar respon cepat indeks Perkembangan Harga (IPH) digunakan sebagai alat deteksi dini untuk mengetahui komoditas yang mengalami gejolak harga mingguan. Pemanfaatan data ini membantu TPID dalam mengarahkan fokus

pemantauan dan respon kebijakan secara cepat dan terukur.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan yang dilakukan pada Triwulan II merupakan upaya dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam Pelaksanaan pengawasan terhadap harga barang kebutuhan pokok, penting, dan jasa dilakukan secara rutin dan terkoordinasi, sehingga jalur komunikasi dan penanganan kondisi di lapangan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efektif.

Hal ini menjadi dasar penting bagi pimpinan daerah dalam proses pengambilan keputusan serta perumusan solusi atas permasalahan harga dan pasokan yang timbul dengan Berbagai langkah konkret yang telah dilaksanakan, seperti Gerakan Pangan Murah, Operasi Pasar Murah, dan pemanfaatan data IPH mingguan sebagai deteksi dini gejolak harga serta kegiatan penanaman benih jagung hibrida.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Melaksanakan Laporan Kecamatan Merevitalisasi mekanisme pelaporan harga dari kecamatan melalui bimbingan teknis dan standarisasi format hal ini penting sebagai dasar pengambilan keputusan dan proyeksi inflasi lokal, 2. Penguatan Produksi Lokal dan Ketahanan Pangan Melanjutkan dan memperluas program penanaman komoditas hortikultura dan pangan strategis (seperti jagung, cabai, dan bawang) untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, serta membangun kemandirian pangan jangka menengah, 3. Penguatan KAD (Kerja Sama Antar Daerah) Mendorong pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan kabupaten/kota penghasil komoditas utama (misalnya bawang merah, ayam ras, dan daging sapi) untuk memastikan kelancaran distribusi dan keterjangkauan pasokan.